

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga adalah konflik sosial. Konflik Balinuraga bermula dari kecelakaan yang dialami oleh pemuda Desa Balinuraga dengan dua gadis Desa Agomm. Dalam kecelakaan yang terjadi timbulah isu pelecehan seksual yang diduga dilakukan para pemuda. Fakta kejadian yang sebenarnya adalah kejadian sebuah kecelakaan lalulintas. Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga dilatarbelakangi kesalahfahaman dalam kejadian pemicu konflik. Isu pelecehan seksual mengalami eskalasi konflik dan berujung pada tindakan anarkis. Jadi dapat disimpulkan bahwa latarbelakang terjadinya konflik di Desa Balinuraga dikarenakan adanya isu tentang pelecehan seksual.

Faktor utama yang mempengaruhi dan melatarbelakangi konflik Balinuraga adalah faktor dendam. Selain faktor dendam terdapat pula faktor-faktor lain yang menjadi alasan warga menyerang Desa Balinuraga, salah satunya faktor etnis, faktor ekonomi, faktor sosial, agama, Segregasi geografis atau lokalitas dan faktor politik. Faktor etnik, agama, ekonomi dan politik dapat dipandang sebagai komplementer yang menambah semakin kerasnya konflik. Faktor-faktor diatas dapat menjadi faktor yang dapat memperluas dan memperbesar konflik Desa Balinuraga.

2. Politisasi yang terjadi dalam konflik Balinuraga dijelaskan bahwa menjadi ajang bagi aktor konflik untuk memanfaatkan konflik Balinuraga untuk mendapatkan keuntungan individu atau kelompoknya. Proses politisasi di dalam konflik tidak

terlepas dari para aktor–aktor konflik yang ada di dalamnya. Aktor–aktor konflik tersebutlah yang menjalankan politisasi tersebut. Aktor-aktor konflik tersebut ada yang berasal dari kelompok yang berkonflik, dan dari luar kelompok yang berkonflik termasuk aktor-aktor politik.

Para aktor politik dengan beranekaragam kepentingan yang tersurat maupun yang tersirat memanfaatkan konflik Balinuraga. Kepentingan–kepentingan politik itulah yang melatarbelakangi politisasi terjadi. dilihat dari kategori aktor yang terlibat konflik, terdapat aktor-aktor konflik yang mempunyai peran yang beragam dalam konflik. adapun aktor-aktor tersebut adalah aktor pemuda, masyarakat keduabelah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat, Para elit politik dan aktor politik dalam konflik, Aktor media dalam konflik.

Peran aktor-aktor yang terlibat dalam konflik adalah menciptakan dan menyebarkan isu pelecehan seksual, memobilisasi masa untuk menyerang Desa Balinuraga, memprovokasi masa agar konflik semakin memanas, menanamkan sikap antipati terhadap kelompok musuh, dan memberitakan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Dalam politisasi terdapat tujuan aktor-aktor yang mempolitisasi konflik Balinuraga. Tujuan aktor politik dan elit politik terjadi dalam ranah memperebutkan sebuah kedudukan, memperlihatkan eksistensi, mendapatkan sebuah pengakuan, menunjukkan superioritas, sampai untuk mendapatkan kekuasaan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa politisasi yang terjadi dalam konflik Balinuraga terjadi pada fase konflik membesar dan meluas. Konflik Balinuraga timbul akibat permasalahan sosial yang melibatkan aktor-aktor konflik yang mempolitisasi konflik tersebut untuk mencapai tujuan.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya penanganan konflik yang dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, pihak pemerintah, dan awak media. Konflik yang terjadi seharusnya dilakukan penanganan agar terjadi kesepakatan damai. Aktor-aktor konflik seharusnya saling menahan diri agar tidak termakan isu-isu yang dapat membesarkan konflik dan memperkeruh masalah. Masyarakat sudah seharusnya memahami konflik yang terjadi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sudah seharusnya konflik yang terjadi tidak menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan pribadi dari aktor individu atau kelompok yang ingin memanfaatkan konflik yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan.
2. Perlu dilakukan upaya pencegahan dini konflik sosial. Pemerintah Lampung Selatan harus lebih tanggap dalam upaya pengelolaan konflik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Pemerintahan di daerah harus lebih memperhatikan peluang konflik yang ada di daerah. Pemerintah juga harus dapat memetakan daerah–daerah rawan konflik antarkampung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Perlu dirumuskan sistem pengawasan terhadap Desa–desa dan masyarakat yang ada didalamnya, yang rawan terjadi konflik secara terus menerus sehingga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak terjadi penyimpangan dan gesekan–gesekan antarwarga yang mengakibatkan konflik. Ketidakseriusan dalam penanganan, lemahnya dedikasi dan inovasi serta penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang telah dirumuskan dalam rencana strategis daerah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun dalam jangka

panjang. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mencerna informasi-informasi dan isu-isu yang memprovokasi yang dapat memicu sebuah konflik.